

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) SEBAGAI SARANA PENCAPAIAN E-GOVERNMENT

Bani Ilham Alhadi

Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia

Universitas Airlangga, Indonesia

[*baniilhamalhadi@gmail.com*](mailto:baniilhamalhadi@gmail.com)

Abstrak

Penulis membahas mengenai pentingnya penggunaan sistem informasi manajemen guna pelaksanaan dan tercapainya e-government yang efektif dan efisien. Dimana peran teknologi pada era sekarang akan sangat membantu kerja birokrasi untuk melaksanakan fungsi-fungsinya guna mencapai good governance sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004, UU No. 28 tahun 2004, dan UU No. 28 tahun 1999. Sesuai dengan Intruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional, inisiatif pemerintah untuk pemberlakuan e-government semakin kuat, dimana sistem informasi manajemen diharap dapat membantu pekerjaan dan menjadi sarana untuk menentukan keputusan demi tercapainya fungsi-fungsi pemerintah. Sehingga penulis menyimpulkan bahwasanya sistem informasi manajemen dapat membantu birokrasi Sebagai Penunjang Kinerja Organisasi, pendukung dalam pengambilan keputusan, penyalur informasi dengan cepat, serta sebagai sarana pendukung kegiatan-kegiatan operasional lainnya. Namun dalam pelaksanaannya, sistem informasi manajemen, e-government pasti memiliki hambatan, dimana sumber daya manusia yang kurang kompeten, hingga teknologi yang kurang memadai, semua tergantung bagaimana setiap organisasi mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Kata Kunci : *Sistem Informasi Manajemen, E-Government, Good Governance*

Abstract

The author wants to discuss the importance of using management information systems for the implementation and achievement of effective and efficient e-government. Where the role of technology in the current era will greatly assist the work of the bureaucracy to carry out its functions in order to achieve good governance in accordance with Law no. 32 of 2004, Law no. 28 of 2004, and Law no. 28 of 1999. In accordance with Presidential Instruction No. 3 of 2003 concerning National Policies and Strategies, the government's initiatives for the implementation of e-government are getting stronger, where management information systems are expected to help work and become a means of making decisions in order to achieve government functions. So the authors conclude that management information systems can help the bureaucracy as a support for organizational performance, support in decision making, distribute information quickly, and as a means of supporting other operational activities. However, in practice, management information systems, e-government must have obstacles, where human resources are less competent, to inadequate technology, it all depends on how each organization overcomes these obstacles.

Keywords: *Management Information System, E-Government, Good Governance*

PENDAHULUAN

Pada zaman yang maju ini, teknologi merupakan sektor penting dalam segala sektor, pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan terutama pada sektor pemerintahan. Dimana sektor pemerintahan setidaknya harus menjalankan fungsi-fungsinya agar mencapai good governance. Berkaitan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah, para ilmuwan mengemukakan pendapat diantaranya, (Tatiek Sri Djatmiati, 2004:9) mengemukakan pengertian fungsi dalam arti Normatif, dalam Disertasinya yang berjudul "Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia", adalah: "Dalam artian ini fungsi adalah "tugas" yang berkaitan dengan jabatan publik." Pengertian ini menunjukkan pada tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat publik dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Pada saat sekarang, menurut pendapat (Haiyanta dkk, 1997:10) paling tidak pemerintah harus menjalankan tiga fungsi yaitu: "fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan." dalam (Ilyas, Syarif, and Netty 2012).

Good Governance sendiri menurut (Handayani and Nur 2019) mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul tuntutan pemerintah orde baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan. sebagai akibat dari konstitusi maupun akibat dari lembaga

tinggi negara lainnya yang tidak berjalan dengan baik, dan juga tersumbatnya control social yang berasal dari partisipasi masyarakat. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini pun masih belum menemukan pemahaman yang baik mengenai apa itu good governance sehingga dalam implementasinya, konsep ini belum dapat berjalan dengan baik. Pemerintahpun mulai mempunyai komitmen untuk menjadikan good governance sebagai landasan atau pondasi nilai pemerintahan.

Masih menurut (Handayani and Nur 2019), "pada masa reformasi, badan eksekutif dan legislatif telah berhasil menciptakan 3 perundang-undangan yang kemudian mengubah sistem dalam pemerintahan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang membahas mengenai pemberian kewenangan yang lebih besar untuk daerah (Kabupaten dan Kota) untuk dapat mengatur dan mengelola bidang pemerintahan dan juga bidang pembangunan. Undang undang ini berimplikasi terhadap kebijakan dan perencanaan sebagai dampak dari bergesernya kewenangan pada hal tersebut dengan adanya kebijakan yang terdesentralisasi, maka daerahpun mempunyai kewenangan. Dengan adanya sistem yang terdesentralisasi ini, daerah mempunyai kewenangan untuk dapat menetapkan kebijaksanaan dalam hal

perencanaan dan pembangunan daerah.

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yang membahas mengenai pemberian wewenang yang lebih besar dalam pengelolaan dan pengalokasian dana kepada pemerintah daerah (Kabupaten atau kota). Lebih umumnya undang-undang ini mengatur tata pelaksanaan ini mengatur pelaksanaan perimbangan dalam bidang keuangan antara pusat dan daerah.

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 mengenai pelaksanaan pada bidang pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan ditingkat pusat dan daerah sebagai bentuk pengimplementasian pemerintahan yang baik. Undang-undang tersebut merupakan landasan utama diterapkannya konsep Good Governance sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki orientasi membangun citra pemerintahan sebagai pemberi layanan yang adil kepada masyarakat. Ketiga undang-undang tersebut merupakan pondasi utama diterapkannya konsep

Good Governance dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi kepada pembangunan citra pemerintahan sebagai pemberi layanan yang adil.”

Sehingga muncul pertanyaan bagaimana cara pemerintah untuk mencapai citra dan fungsi yang baik kepada publik di zaman yang maju ini. Oleh sebab itu salah satu caranya yaitu pemanfaatan teknologi, yang juga menjadi capaian pemerintah untuk pengefektifan dan pengefisienan kerja dengan mengusung E-Government untuk menjadi sarana sistem pengintegrasian pekerjaan. Dimana yang didalamnya ada sistem informasi untuk mengelola data masuk (*input*), memprosesnya (*process*), dan mengeluarkan hasil (*output*). Berdasarkan buku Abdul kadir (2003:11) Wilkinson mengemukakan bahwa sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah masukan (*input*) menjadi keluaran (*informasi*), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan, (Darmawan 2015).

TELAAH PUSTAKA

a. Pengertian Sistem

Sistem merupakan suatu jaringan kerja yang saling berhubungan atau elemen-elemen yang saling berinteraksi atau

kerjasama untuk mencapai satu tujuan. Dan menurut Sutabri (2003:3) dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu

sama lain dan terpadu. Sedangkan sistem menurut Fatta (2007:3) mengemukakan bahwa sistem adalah sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Senada dengan yang dikemukakan oleh Sutabri dan Fatta, Kadir (2003:54) mengatakan sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan, (Darmawan 2015).

b. Pengertian Informasi

Dalam (Darmawan 2015), Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang telah mempunyai arti bagi penerimanya dan dapat mendukung manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Sutabri (2003:18) mengemukakan informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Fata (2007:9) Davis mengemukakan informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.

c. Pengertian Manajemen

Menurut (Naidah 2009), Manajemen sering diartikan sebagai ilmu dan seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui kegiatan orang lain. Salah satu definisi yang cukup jelas dan banyak digunakan orang adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Mary Parker Pollet (2002 : 29) bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dengan upaya anggota organisasi, untuk menggunakan semua sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau sesuai dengan target. Pada umumnya semua kegiatan dalam pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Demikian pula halnya dengan tujuan dijalankannya internal control, kalau menurut R. Soemita Adikoesumah, Azas-Azas Manajemen, (2000 : 121), mengemukakan tujuan internal control, sebagai berikut :

1. Membantu manajemen dalam pelaksanaan administrasi pada perusahaan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan prosedur untuk menentukan kebijaksanaan kerja organisasi.
2. Memberi tahu dan bila perlu membetulkan cara kerjanya agar lebih efektif dan efisien.

3. Menentukan tingkat kebenaran data akuntansi yang dibuat dan keefektifan prosedur intern.
4. Menentukan sampai sejauhmana perlindungan, pencatatan, dan pengawasan terhadap kekayaan organisasi yang mungkin dapat menyebabkan kecurian.

d. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Menurut Yakub (2012: 17) dalam (Kaleb, Lengkong, and Taroreh 2019), sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Organisasi terdiri dari sejumlah sumber daya manusia, material, mesin, uang dan informasi. sumber daya tersebut bekerja sama menuju tercapainya suatu tujuan tertentu yang ditentukan oleh pemilik atau manajemen. Menurut Hartono (2013: 20) Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian/komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan.

Juga dalam (Naidah 2009), menurut Syampurnajaya (2000) Sistem Informasi merupakan aliran data, transaksi dan kegiatan dari suatu organisasi yang berfokus pada kualitas, waktu pengembangan, fleksibilitas, biaya

dan perawatan piranti lunak (software). Teknologi Informasi (TI) merupakan kebijakan standard infrastruktur seperti piranti keras (hardware) dan jaringan networking. TI lebih berfokus pada kemampuan, merespon kemudahan dan rasio biaya/performansi, sedangkan Manajemen Informasi (MI) lebih berfokus pada penggunaan, kualitas dan integrasi dari informasi. Oleh karena itu SI, TI dan MI yang diperlukan oleh manajemen yang di sebut “Sistem Informasi Manajemen (SIM)”, dimana memiliki komponen-komponen sebagai berikut: piranti keras, piranti lunak, data jaringan, sumber daya manusia dan prosedur.

Sistem informasi Manajemen (SIM) menurut davis (1995) mengemukakan bahwa sistem informasi yang selain melakukan semua transaksi yang dipelukan oleh sesebuah organisasi, juga memberi dukungan informasi dan mengeloh untuk fungsi manajemen dan pengambilan keputusan. Dalam membahas sistem informasi tidak bisa dipisahkan dengan Teknologi Informasi, oleh karena itu Syampurnajaya(2000) mebahas menjadi tiga kategori sebagai komponen utama, yaitu:

1. Piranti Keras (Hardware), teknologi “mainframe” merupakan suatu teknologi sentralisasi dimana tempat penyimpanan data di pusatkan

disuatu tempat sehingga kontrol hanya terbatas pada suatu group dan devisi. Sedangkan teknologi “Client Server” menggunakan desentralisasi sehingga penyimpanan data tersebar di berbagai tempat. Saat ini banyak perusahaan dan organisasi yang beralih dari teknologi Mainframe ke teknologi Clien Server sehingga banyak pengguna memanfaatkan PC (Personal Computer) yang memiliki konfigurasi yang rendah sebagai client dan mengambil serta mengelolah data dari PC lainya sebagai server

2. Piranti lunak (software), piranti lunak dibagi dalam tiga komponenn utama, yaitu:
 - a. Sistem operasi piranti lunak, sistem operasi ini sangat mutlak diperlukan dalam menjalankan aplikasi piranti lunak. Dulu dikenal sistem operasi DOS, saat ini banyak sistem operasi yang dapat diperlukan, antarlain Microsoft mengeluarkan Windos XP, Windows Vista serta Windows 7. IBM juga mengandalkan sistem informasi yaitu OS/2 kesemuanya tersebut dipergunakan untuk pemakai yang berbasis PC.

Kriteria untuk sistem operasi yang berbasis PC yang diperlukan untuk dimasa mendatang adalah biaya yang relatif murah dalam penerapan serta dapat dimodifikasioleh penggunanya.

- b. Aplikasi Piranti lunak, organisasi dihadapkan pada dua pilihan yaitu mengembangkan aplikasi sendiri (Application development) dan membeli paket aplikasi (Application Package). Aplikasi sendiri (Applicaton Development).

Untuk mengembangkan/membuat aplikasi sendiri, diperlukan progremmer tertentu. Aplikasi Paket (application package), dalam menentukan atau pemilihan piranti lunak, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pantas atau layaknya piranti lunak tersebut diterapkan berdasarkan pengalaman, referensi, pertimbangan organisasi, pelayanan dan tingkat produktifitas.

3. Telekomunikasi, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dapat mengeliminasi hambatan letak maupun geografis

dan waktu, sehingga perusahaan ataupun organisasi meningkatkan jasa dan produksinya, memperlancar kinerja, pengambilan keputusan, pengembangan segmentasi pasar yang lebih luas dan mudah dalam membina hubungan dengan kostumer. Sebagai contoh: Electronic Mail (E-mail), Fax-mail, Voice Over Internet Protocol (VOIP), Teleconference, Waireless Application Protocol (WAP), dan Electronic Data Interchange (EDI).

e. Pengertian E-Government

Menurut (Karniawati and Rahmadani 2008), E-Government merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Implementasi e-Government dalam penerapannya dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud keterbukaan (transparency) dalam pelaksanaan pelayanan publik. Bentuk layanan sederhana lainnya, e-Government dapat

dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi baik intern di kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun komunikasi interaktif dengan masyarakat melalui media e-mail, chatting atau teleconference.

Dalam perkembangannya, implementasi e-Government dikalangan pemer- intahan menjadi sebuah trend diseluruh penyelenggaraan pemerintahan. Hampir keseluruhan jenis aplikasi yang diperguna- kan pasti melibatkan pengolahan data menjadi informasi yang selanjutnya akan dipergunakan oleh pemerintah ataupun stakeholders dalam proses pengambilan keputusan. Didalam pemerintahan hampir setiap hari para birokrat di pemerintahan harus mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan/ keberadaan pemerintahan yang bersang- kutan.

Inisiatif e-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan Pada intinya, Inpres tersebut membahas tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Lebih jauh lagi, e-Government wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor kantor pemer intahan. Administrasi publik adalah salah

satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan institusi pemerintah.

Lebih jelas mengenai Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 juga dijelaskan oleh (Risnandar 2014), "Inpres Nomor 3 tahun 2003 ini tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Diterbitkannya Inpres ini dengan pertimbangan, antara lain:

1. Bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.
2. Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

3. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-Government.
4. Bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan e-Government secara nasional.

PEMBAHASAN

Manfaat Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Birokrasi

1. Sebagai Penunjang Kinerja Organisasi
Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer sangat berperan penting dalam hal menciptakan kualitas dan kinerja yang baik bagi

para pegawai di lingkungan instansi pemerintahan. Sehingga setiap tugas-tugas para pegawai dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan tanpa memerlukan jarak waktu yang lama dengan jumlah pekerjaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem manual. Tidak hanya dari segi waktu, dari segi kuota

atau banyaknya jumlah tugas-tugas yang diberikan pun bisa terselesaikan dengan cepat dan lebih teliti. (Firman Alandari. 2013) dalam (Sujata, Noak, and Supriyanti 2016).

2. Sebagai Pendukung dalam Pengambilan Keputusan

Nilai suatu informasi berhubungan erat dengan keputusan, dimana bila tidak ada pilihan atau keputusan maka sebuah informasi tidak akan diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Sedangkan parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi dapat ditentukan dari dua hal pokok yaitu manfaat (benefit) dan biaya (cost) menurut Wahyono (2004) dalam (Karniawati and Rahmadani 2008). Suatu informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya dan sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektifitasnya. Dalam hal ini untuk dapat menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas dan cepat maka yang dibutuhkan adalah sistem pengolahan informasi yang baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti saat ini yaitu salah satunya dengan mengaplikasikan sistem informasi manajemen berbasis komputer, (Firman Alandari. 2013) dalam (Sujata et al. 2016).

Dalam sebuah organisasi/ instansi pemerintahan setiap elemen-elemen yang ada sangat dituntut untuk dapat memanfaatkan komputer dalam menerapkan SIM. Apabila elemen-elemen tersebut dapat memanfaatkan komputer dalam implementasi SIM-nya, maka baik staff maupun Kabag, Kasubbag dan yang lainnya yang berada di lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Berau dapat memperoleh sebuah informasi yang bermutu, bernilai dan berkualitas yaitu informasi yang relevan bagi instansi tersebut, yang akurat dan tentu saja informasi yang tepat waktu dan tidak kadaluarsa sebagai bahan dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan setiap permasalahan yang dihadapinya dalam proses pencapaian sasarannya khususnya dalam proses pemberian layanan kepada pihak masyarakat.

3. Sebagai penyalur informasi dengan cepat

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, hampir setiap lembaga-lembaga dan instansi-instansi pemerintahan telah mulai menerapkan Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer dalam setiap kegiatan operasionalnya guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saat ini Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer juga telah dihubungkan dunia internet yang sering di kenal dengan website, website ini juga sangat diperlukan dalam menyalurkan

sebuah informasi dengan cepat. Dengan adanya media internet ini (website) ini, seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dengan melalui dunia internet sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.

4. Sebagai pendukung kegiatan operasional

Dalam hal penyusunan dan percetakan laporan kegiatan ataupun transaksi-transaksi yang dilakukan dengan mereapkan SIM berbasis komputer dengan tujuan untuk menciptakan adanya penghematan baik waktu ataupun tenaga para pegawai.

Hambatan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen

Hambatan sebuah organisasi dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen bisa berupa kurangnya kelengkapan fasilitas yang memadai. Pada umumnya untuk mengolah data-data dalam sistem informasi manajemen dibutuhkan penggunaan teknologi komputer. Oleh karenanya, jika fasilitas ini tidak memadai maka proses implementasi sistem informasi manajemen akan terhambat.

Hambatan lainnya dalam pengimplementasian sistem informasi manajemen ialah kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan sistem informasi manajemen. Jadi jika seseorang kurang terampil dalam pengolahan sistem

informasi manajemen, maka akan sulit bagi orang tersebut untuk mengolah data yang ada.

Tantangan sebuah organisasi dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen bisa berupa ketidakmampuan seseorang dalam mengolah data yang mengakibatkan terhambatnya kinerja organisasi. Selain itu tantangan lain dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen ialah kemampuan organisasi mengelola data secara efektif yang dijadikan sebagai sumber yang penting. Jadi dalam mengelola data tidak hanya tergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak komputer saja, tetapi juga tergantung pada kemampuan seseorang dalam pengolahan data.

Observasi secara lebih mendalam menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah belum menunjukkan arah pembentukan e-government yang baik. Beberapa kelemahan yang menonjol adalah : a) pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah, belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah; b) belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan *e-government* pada masing-masing instansi; c) Inisiatif-

inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri; dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintah ke dalam

PENUTUP

Sistem informasi manajemen akan sangat membantu pekerjaan di birokrasi dengan segala keunggulannya. Akan tetapi teknologi juga memiliki kendala dimana jika tidak dikelola dengan baik, orang yang kurang tepat pada posisinya, dan sarana teknologi itu sendiri yang kurang update, maka pengguna tidak akan memperoleh hasil yang optimal,

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Erlan. 2015. "Implementasi E-Government Dalam Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan Pada Kantor Urusan Agama Berbasis Web." *Jurnal Cloud Information* 1:15–22.
- Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur. 2019. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11(1):1–11. doi: 10.15575/jpan.v11i1.7631.
- Ilyas, Husin, Afif Syarif, and Netty. 2012. "Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 14:47.
- Kaleb, B. J., V. P. K. Lengkong, and R. N. Taroreh. 2019. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dan Pengawasannya Di Kantor Pekayanan Pajak Pratama Manado." *Penerapan.... 781 Jurnal EMBA* 7(1):781–90.
- Karniawati, Nia, and Romi Rahmadani. 2008. "Analisis Kebijakan Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) (Suatu Studi Pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)." *Majalah Ilmiah Unikom* 7(2):233–48.
- Naidah, Hj. 2009. "Pengaruh Sistem Informasi Manajemen (Sim) Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Metro Batavia Air Distrik Makassar." *Sistem Informasi* 1:11.

pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapatkan perhatian. d) pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula.

seperti yang telah penulis rangkum dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah otonom berada pada tingkat pertama (persiapan), dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan). Sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan tingkat empat (pemanfaatan) belum tercapai.

- Risnandar. 2014. “Analisis E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah.” *Katalogis* 2(7):192–99.
- Sujata, P. P. A., P. A. Noak, and N. W. Supriyanti. 2016. “Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Terhadap Kinerja Pegawai Pada Koperasi Pegawai Negeri (Kpn) Bina Sejahtera Kabupaten Badung.” *Citizen Charter*.